

BAB III

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT TIONGHOA

A. Latar Belakang Dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967

Orde Baru memulai kekuasaannya setelah Soeharto menjadi presiden. Saat itu dimulailah penerapan kebijakan yang melarang segala hal yang berbau Tionghoa. Sebuah rezim pro-Barat yang berdiri dipimpin Soeharto kemudian membawa Indonesia menjadi negara yang sangat diskriminatif pada etnis Tionghoa.¹

Kelahiran Orde Baru erat kaitannya dengan penumpasan gerakan komunisme pada tanggal 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan G-30-S/PKI. Gerakan G-30-S/PKI diduga memiliki afiliasi dengan organisasi yang didirikan pada tahun 1945 yang bernama Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Organisasi etnis Tionghoa ini semula bertujuan baik yaitu untuk menyatukan tujuan politik orang-orang Tionghoa yang telah menjadi warga negara Indonesia dan loyal pada pemerintah Indonesia, namun dikemudian waktu organisasi ini lebih terarah pada upaya pemupukan dan pemeliharaan nasionalisme komunis Tiongkok. Hal ini terbukti pada waktu pemberontakan G30S/PKI, organisasi ini menjadi alat PKI yang besar perannya.²

¹Nurani Soyomukti, *Soekarno & Cina* (Yogyakarta: Garasi, 2002), hlm. 304.

²Hidajat Z. M., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 161.

Ketua Baperki tidak tahu menahu tentang membelokkan tujuan organisasi yang dilakukan oleh para anggotanya. Anggota organisasi ini banyak yang berpaham komunis Tiongkok.³ Mereka kebanyakan merupakan kaum loyalis komunis Tiongkok yang berafiliasi dengan gerakan komunis Indonesia (Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI).⁴ Perjanjian bantuan persenjataan dari pemerintah RRT untuk melatih para Pemuda, Rakyat dan Gerwani – dikenal dengan program mempersenjatai buruh dan tani sebagai angkatan kelima setelah ABRI – dapat terjadi berkat jalinan PKI dan Baperki yang sangat dipercaya oleh pemerintah Tiongkok.

Orang-orang keturunan Tionghoa ternyata diketahui banyak di antara mereka yang bersimpati kepada pemberontakan G30S/PKI tersebut.⁵ Sejak terungkap keterlibatan pemerintah Tiongkok dalam kudeta G30S/PKI, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa tindakan di segala bidang kehidupan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia. Hubungan diplomatik dan perdagangan dengan

³Meskipun Baperki memilih ideologi kiri, organisasi ini berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai perwakilan yang menonjol dari warga negara Indonesia Tionghoa. Organisasi khususnya tetap menerima dukungan dari mayoritas masyarakat Tionghoa karena kegiatannya tidak terbatas pada lingkaran kegiatan politik. Lihat: Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa mencari Identitas* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 26-27.

⁴PKI mendapat angin dari pemerintah Orde Lama karena Presiden Soekarno memiliki paham demokrasi dan liberalisme dalam berpartai dan berpolitik. Berkembangnya komunisme dianggap sebagai wujud liberalisme dalam berpartai dan berpolitik. Kedekatan antara pemerintah Orde Lama dengan pemerintah Cina disebut juga dengan poros Jakarta – Peking (sekarang Beijing). Lihat: Paulus Hariyono, *Menggali Latar Belakang Stereotip dan Persoalan Etnis Cina di Jawa: Dari Jaman Keemasan, Konflik Antar Etnis Hingga Kini* (Semarang: Mutiara Wacana, 2006), hlm. 82.

⁵Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985), hlm. 61.

RRT dibekukan.⁶ Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menaruh curiga atas hubungan-hubungan yang dijalin oleh komunitas Tionghoa dengan Republik Rakyat Tiongkok. RRT dituding sebagai salah satu negara komunis di belakang G30S/PKI. Upaya memblokir hubungan antara keturunan Tionghoa di Indonesia dengan RRT dilakukan untuk mencegah penyusupan paham komunisme Tiongkok ke Indonesia.

Sejak peristiwa G30S/PKI, ada trauma yang mendalam di kalangan warga Tionghoa yang menyebabkan mereka selalu menghindari keterlibatan bidang politik. Mereka bahkan enggan berbicara tentang hal-hal yang terjadi pada waktu itu. Orang-orang keturunan Tionghoa distigmatisasikan sebagai kelompok yang berkiblat (komunis) ke Tiongkok selama Orde Baru.⁷ Sejak awal berdirinya rezim Soeharto, ada keyakinan umum bahwa keturunan Tionghoa tidak memiliki sentimen kebangsaan. Orang-orang keturunan Tionghoa dicurigai telah mendukung politik kaum kiri karena RRT adalah negara komunis. Terjadi identifikasi yang esensial dan umum antara etnis Tionghoa dan komunisme. Stigma sebagai Tionghoa dan keadaan sebagai Tionghoa karena telah terlibat dalam kudeta komunis 1965 dianggap menular dan menurun ke generasi selanjutnya.⁸

Pengakuan terhadap identitas kultural sebagai hak yang perlu dimiliki oleh setiap kelompok etnis juga dirasakan oleh orang-orang keturunan Tionghoa di

⁶Hariyono, *op. cit.*, hlm. 82-84.

⁷Chang-Yau Hoon, *Identitas Tionghoa Pasca-Suharto: Budaya, Politik dan Media* (Jakarta: Yayasan Nabil dan LP3ES, 2012), hlm. 176.

⁸Hoon, *op. cit.*, hlm. 39.

Indonesia. Keberadaan mereka hingga sekarang masih menjadi persoalan. Orang-orang keturunan Tionghoa belum diterima secara penuh sebagai bagian dari anggota bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya istilah baku bagi orang-orang keturunan Tionghoa yang telah menanggalkan akar-akar kultural mereka dari negeri asal.⁹

Pengakuan terhadap identitas kultural (keturunan Tionghoa) merupakan salah satu bagian dari “masalah Tionghoa” yang belum terselesaikan. Pada masyarakat pribumi berkembang pandangan yang tidak menguntungkan terhadap keberadaan orang-orang keturunan Tionghoa, seperti misalnya stereotip yang mengatakan bahwa orang-orang keturunan Tionghoa cenderung eksklusif dan mempertahankan hubungan “kekerabatan” dengan negeri leluhurnya. Disamping masih berkembangnya stereotip negatif di kalangan pribumi terhadap orang-orang keturunan Tionghoa, kebijakan pemerintah yang tidak jelas dalam menangani persoalan berbasis kultural, merupakan wujud nyata dari “masalah Tionghoa” yang belum terselesaikan tersebut.¹⁰

“Masalah Tionghoa” di Indonesia sangat berkaitan dengan sikap dan kebijakan pemerintah yang tidak cukup tegas dalam persoalan kewarganegaraan orang-orang keturunan Tionghoa. Kebijakan asimilasi yang diterapkan menjadi salah arah, karena muncul pandangan bahwa loyalitas orang-orang keturunan Tionghoa hanya dapat dicapai melalui pengingkaran terhadap ciri-ciri kultural

⁹Turnomo Rahardjo, ‘Kebijakan Pemerintah Tentang Etnis Cina’, dalam *Dialogue JIAKP*, Vol. 2, No. 2, Mei 2005, hlm. 784.

¹⁰Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 785.

mereka.¹¹ Dalam kenyataannya, keragaman adalah sebuah fakta kehidupan, dan kesatuan dalam keberagaman dapat dicapai tanpa harus melakukan penyeragaman.¹²

Pada masa Orde Baru, pemerintah menetapkan kebijakan asimilasi sebagai solusi untuk mengatasi “masalah Tionghoa”. Kebijakan asimilasi ini pada dasarnya menganjurkan orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia agar membaaur dengan masyarakat lokal.¹³ Dengan diterimanya program asimilasi sebagai solusi nasional untuk mengatasi “masalah Tionghoa”, maka pada saat yang bersamaan dikeluarkan beberapa regulasi yang “mendukung” kebijakan asimilasi tersebut, yaitu (1) Pelarangan sekolah dan penerbitan berbahasa Tionghoa; (2) Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang Pergantian Nama; (3) Instruksi Presiden No. 14/1967 yang mengatur agama, kepercayaan dan adat istiadat keturunan Tionghoa; (4) Keputusan Presiden No. 240/1967 mengenai kebijakan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing; dan

¹¹*Ibid.*, Lihat juga: Leo Suryadinata, ‘Ethnic Chinese in Southeast Asia: Overseas Chinese, Chinese Overseas or Southeast Asians?’, dalam Leo Suryadinata, (ed.), *Ethnic Chinese as Southeast Asians* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997).

¹²*Ibid.*,

¹³Paham asimilasi ini dikembangkan dan diperjuangkan oleh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) dan dilanjutkan oleh Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa). Lihat: Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 786.

(5) Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Tionghoa.¹⁴

Salah satu peraturan berkaitan dengan asimilasi, yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Baru yaitu Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Isi Instruksi tersebut adalah:

Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata cara ibadat Tionghoa yang memiliki aspek afinitas kultural pada negeri leluhur, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan¹⁵

Segala aktivitas yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, dan adat istiadat keturunan Tionghoa dibatasi. Instruksi Presiden ini bertujuan melikuidasi pengaruh seluruh kebudayaan Tionghoa, termasuk kepercayaan, tradisi, adat istiadat, dan agamanya, dan mendorong terjadinya asimilasi secara total.¹⁶

Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 yang menyatakan adat istiadat orang Tionghoa dilarang dipertontonkan di depan umum, membuat keturunan Tionghoa tidak bebas melestarikan budaya leluhurnya di Indonesia. Tidak hanya itu, pelestarian budaya leluhur orang-orang keturunan Tionghoa dikhawatirkan oleh pemerintah akan mengganggu proses program asimilasi yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Soeharto mengakibatkan pengikisan bahasa serta kebudayaan

¹⁴Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 786. Lihat juga: Alfian Hamzah, editor, *Kapok Jadi Nonpri: Warga Tionghoa Mencari Keadilan* (Bandung: Zaman Wacana, 1998), hlm. 86-87.

¹⁵Lihat Lampiran C.

¹⁶Stanley Adi Prasetyo, 'Adakah Media Untuk Keturuna Tionghoa?', dalam I. Wibowo dan Thung Ju Lan, editor, *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 167.

Tionghoa. Organisasi dibubarkan dan sekolah Tionghoa ditutup. Hal itu sejalan dengan kebijakan asimilasi ini.¹⁷ Kebijakan asimilasi di Indonesia merupakan kebijakan yang paling radikal, sebab kebijakan tersebut telah menghilangkan tiga pilar yang menyangga keberadaan masyarakat dan identitas kultural orang-orang keturunan Tionghoa, yaitu sekolah, media massa, dan asosiasi-asosiasi orang-orang keturunan Tionghoa.¹⁸

Tidak hanya itu, mereka yang ingin mendirikan rumah ibadah (kelenteng) juga tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan hanya memperbaiki, mengecat, atau memelihara kelenteng. Istilah kelenteng yang menunjukkan tempat ibadah orang Tionghoa tidak lagi boleh digunakan dan diganti dengan Wihara (tempat ibadah umat Budha). Pelarangan terhadap penayangan iklan di televisi juga dilakukan. Media seperti iklan di televisi dan film dapat memainkan peran dalam pembentukan identitas. Media tersebut dianggap sebagai sarana imajinasi orang keturunan Tionghoa Indonesia untuk menggambarkan identitas mereka yang telah dengan sengaja dimatikan oleh kebijakan asimilasi total Orde Baru. Hal itu dikhawatirkan dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan ketegangan sosial antara peraturan diskriminatif pemerintah dan perilaku orang-orang Tionghoa.¹⁹

Orang-orang keturunan Tionghoa juga diharuskan mengganti nama Tionghoanya dengan nama-nama yang digunakan oleh orang Indonesia untuk

¹⁷Dawis, *op. cit.*, hlm. 27-28.

¹⁸Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 787.

¹⁹Etik Mahareni D. P., "Sekolah *Khong Kauw* (SKK) Semarang 1950-1979: Pembentukan Identitas, Pendidikan Karakter, dan Strategi Adaptasi Masyarakat Tionghoa" (Tesis Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm. 20.

memudahkan program asimilasi serta diharuskan berpindah keyakinan agama ke agama Buddha, Kristen atau Katholik (bukan Khonghucu) karena agama Khonghucu pada saat itu tidak diakui oleh pemerintah. Keluarnya Instruksi Presiden tersebut menimbulkan dampak cukup besar bagi kehidupan orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Perasaan tertindas, dikucilkan, dibenci, dan dilecehkan, mereka rasakan selama bertahun-tahun.

Kebijakan asimilasi yang diterapkan pada masa Orde baru didasarkan pada semboyan *Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa*. Indonesia mempunyai masyarakat yang beraneka ragam, bergabung bersama sebagai kesatuan Indonesia seperti yang digambarkan dalam lambang “*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa*”. Makna semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* berarti berbeda-beda tetapi pada hakekatnya satu, sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakekatnya satu, satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Sementara semboyan *Tan Hana Dharma Mangrwa*²⁰ memiliki makna yaitu tidak ada kebenaran yang bermuka dua, sesungguhnya

²⁰Semboyan *Tan Hana Dharma Mangrwa* ini dianut dan dipercayai oleh Presiden Soeharto pada waktu itu karena Presiden Soeharto sendiri adalah seorang militer. Semboyan *Tan Hana Dharma Mangrwa* juga diterapkan di bidang militer, sesuai dengan maknanya yaitu tidak ada keragu-raguan, tidak ada kebenaran yang bermuka dua serta senantiasa berpegang dan berlandaskan pada kebenaran yang satu, karena di dalam militer sendiri kesetiaan dan kepercayaan hanya ada satu yaitu kepercayaan kepada pemimpin. Semboyan *Tan Hana Dharma Mangrwa* ini diterapkan kepada orang-orang keturunan Tionghoa karena mereka memiliki kesetiaan yang mendua yaitu kesetiannya kepada Indonesia, dan juga kepada negerinya yaitu Tiongkok. Dengan diterapkannya semboyan ini, maka diharapkan orang-orang keturunan Tionghoa hanya mempunyai kesetiaan yang satu yaitu kesetiaan kepada negara Republik Indonesia.

memiliki pengertian agar hendaknya setiap insan manusia senantiasa berpegang dan berlandaskan pada kebenaran yang satu.²¹

Orang-orang keturunan Tionghoa diharapkan untuk meleburkan kebudayaan, adat istiadat serta ciri-ciri lainnya ke dalam kebhinnekaan masyarakat Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menghendaki kesatuan bangsa, termasuk juga kesatuan antara minoritas dan mayoritas. Golongan minoritas tidak bisa hanya menuju ke suatu masyarakat yang adil dan makmur, tetapi harus juga memenuhi dan melaksanakan cita-cita negara Indonesia yaitu ke arah kesatuan. Menuju ke arah kesatuan ini hanya dapat dicapai dengan jalan asimilasi, sehingga eksklusivisme dari minoritas hancur, sehingga hubungan-hubungan antara minoritas dan mayoritas dipererat dan menambah perkawinan-perkawinan campuran. Dengan demikian maka dapat tercapailah asimilasi biologis, ekonomis, sosial, politik dan lain-lain.²²

Hubungan diplomatik antara RI dan RRT harus tetap dibekukan dalam waktu yang cukup lama ke depan demi tercapainya asimilasi tersebut. Hal ini ikut mendorong pelepasan hubungan batin orang-orang WNI keturunan Tionghoa dengan negeri leluhurnya. Apabila hubungan diplomatik tersebut dicairkan, dikhawatirkan saling mengunjungi antara orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia dan RRT akan berjalan normal. Saling mengunjungi ini akan kembali membangkitkan ikatan-ikatan emosional terhadap negara leluhur yang

²¹Brigaspad, “Bhinneka Tunggal Ika”, (*online*), (<http://www.brigaspad.org/bhinneka-tunggal-ika.html>), diunduh pada 20 April 2014).

²²Yayasan Tunas Bangsa, *Lahirnya Konsepsi Asimilasi* (tanpa penerbit dan tahun terbit), hlm. 64.

sebagian besar sudah hilang dan bisa menjadi penghambat yang besar dalam usaha pembauran.²³

Membangun perasaan nasionalisme pada orang-orang keturunan Tionghoa yang berasal dari suatu negara yang besar, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hubungan antara RI dan RRT yang telah dibekukan dalam waktu yang cukup lama merupakan keberuntungan bagi RI dalam upaya meng-Indonesiakan orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia dan membantu pembinaan nasionalisme Indonesia kepada orang-orang keturunan Tionghoa. RRT adalah suatu negara besar yang mempunyai sejarah masa lalu yang besar, yang patut dibanggakan oleh orang-orang yang mempunyai nenek moyang yang berasal dari sana. Suatu kenyataan bahwa “*Chinese Culturalism*”, yaitu suatu rasa kesatuan dan rasa terikat pada pola-pola kehidupan dan kepada tanah leluhurnya.²⁴

Orang-orang keturunan Tionghoa memiliki perasaan nasionalisme yang kuat terhadap negaranya dan mereka cenderung mengagungkan tradisi nenek moyang (leluhur).²⁵ Negara besar di utara ini sungguh menjadi ganjalan dalam upaya meng-Indonesiakan orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Dalam

²³Husodo, *op. cit.*, hlm. 150.

²⁴Baik RRT maupun Taiwan keduanya mempergunakan sentimen kebudayaan leluhur ini sebagai alat kepentingan politiknya, baik untuk mengumpulkan dana maupun untuk menyebarkan ideologi komunisnya. Kedua negara Tiongkok tersebut berusaha untuk tetap membina dan lebih menajamkan sentimen kebudayaan leluhur ini sehingga dengan demikian selain akan memperoleh dukungan moril dan materil, juga dapat dipergunakan untuk kepentingan politiknya di luar negeri. Lihat: Hidajat, *op. cit.*, hlm. 113.

²⁵Orang-orang Tionghoa perantauan terlihat bahwa mereka selalu mempunyai kecenderungan untuk membuat lingkungannya sendiri, hidup secara eksklusif dengan tetap mempertahankan serta meneruskan adat kebiasaan, kebudayaan dari tradisi leluhur. Lihat: Husodo, *op. cit.*, hlm. 58.

hubungan dengan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia maka usaha pembauran (asimilasi) yang dilakukan mempunyai maksud dan tujuan yaitu meleburnya masyarakat keturunan Tionghoa ke dalam kesatuan bangsa yang utuh, merasakan dirinya adalah bangsa Indonesia. Selain itu, perasaan nasionalisme Indonesia diharapkan dapat tertanam di dalam masyarakat keturunan Tionghoa dan meninggalkan perasaan yang mengarahkan mereka kepada sikap untuk senantiasa berorientasi kepada budaya leluhur.²⁶

Pada praktik asimilasi terhadap orang-orang keturunan Tionghoa, masyarakat Indonesia yang majemuk didasarkan pada prinsip kebangsaan, namun memiliki sistem nasional yang askriptif primordial secara etnisitas. Dalam perspektif tersebut, seseorang tidak bisa menjadi orang Indonesia jika ia tidak menjadi anggota dari salah satu kelompok etnis yang ada dan digolongkan sebagai pribumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kebijakan asimilasi menjadi gagal sebab meskipun orang-orang keturunan Tionghoa sudah berganti nama atau berpindah keyakinan agama, tetapi tetap saja mereka masih digolongkan sebagai bukan orang Indonesia. Ringkasnya, asimilasi gagal karena kebijakan itu sendiri tidak jelas, yaitu orang Tionghoa diasimilasikan ke dalam masyarakat Indonesia ataukah diasimilasikan ke dalam masyarakat etnis.²⁷ Kebijakan asimilasi yang mengharuskan penggantian nama dan berpindah keyakinan agama bagi orang-orang keturunan Tionghoa adalah kebijakan yang salah karena bertentangan

²⁶Husodo, *op. cit.*, hlm. 73.

²⁷*Ibid.*, Lebih jelas baca: Parsudi Suparlan, 'Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural', dalam Simposium Internasional III, *Jurnal Antropologi Indonesia* (Bali: Universitas Udayana, 2002).

dengan hak-hak asasi manusia, jadi tidak demokratis dan tidak bijaksana. Kebijakan asimilasi yang ditempuh dengan cara mengharuskan orang-orang keturunan Tionghoa untuk melaksanakan ganti nama dan berpindah keyakinan agama tidak menjamin dalam waktu singkat penyelesaian masalah minoritas dengan bijaksana dan hapusnya praktik-praktik diskriminasi rasial.²⁸

Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep bangsa Indonesia kembali ke persoalan identitas Indonesia asli. Rezim Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi, untuk menggabungkan etnis Tionghoa dari kelompok nonpribumi ke dalam badan penduduk asli. Semboyan Indonesia selama masa Soeharto, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi, semboyan tersebut tidak diterapkan terhadap orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Hanya minoritas penduduk asli yang berhak menikmati hak-hak Bhinneka Tunggal Ika. Budaya nasional baru yang dibangun Soeharto dengan menegaskan kembali pentingnya ideologi Pancasila tidak pernah secara efektif berupaya mewedahi kehadiran orang-orang keturunan Tionghoa. Dalam proses pendefinisian identitas nasional ini, orang-orang keturunan Tionghoa tetap saja dianggap sebagai orang nonpribumi atau kaum pendatang. Ironisnya, mereka juga terpinggirkan dan mengalami diskriminasi dalam banyak lingkungan, baik sosial, budaya, politik, bahasa, maupun pendidikan.²⁹

²⁸Yayasan Tunas Bangsa, *op. cit.*, hlm. 67.

²⁹Media Indonesia, "Potret Indonesia-Tionghoa: Ambiguitas di Tengah Era Kebebasan", (*online*), (<http://www.indonesiamedia.com/potret-indonesia-tionghoa-ambiguitas-di-tengah-era-kebebasan.html>, diunduh pada 2 Mei 2014).

B. Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967

Pada tanggal 6 Desember 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa semua upacara agama, kepercayaan, dan adat-istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Instruksi Presiden ini bertujuan melikuidasi pengaruh seluruh kebudayaan Tionghoa, termasuk kepercayaan, tradisi, adat-istiadat, dan agamanya, dan mendorong terjadinya asimilasi secara total.

Instruksi ini dianggap sangat penting untuk mengurangi jarak antara etnis Tionghoa dan warga negara lainnya.³⁰ Adanya peraturan yang diskriminatif itu, kelompok keturunan Tionghoa benar-benar hanya mempunyai ruang kebebasan yang sangat sempit. Instruksi tersebut menyebabkan semua perayaan tradisi dan keagamaan kelompok keturunan Tionghoa, termasuk Tahun Baru Imlek, *Cap Go Meh*, dan *Peh Cun*, tidak boleh dirayakan secara terbuka. Pertunjukan seperti barongsai, arak-arakan *toapekong* dirayakan dalam lingkungan intern atau keluarga saja.

Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan dan perayaan hari raya orang-orang keturunan Tionghoa sangat dibatasi. Pembatasan kegiatan yang dialami oleh orang-orang keturunan Tionghoa pada zaman Orde Baru benar-benar memutus mata rantai tradisi ke generasi mereka selanjutnya. Rata-rata generasi yang sekarang ini tidak mengenal adat dan tradisi leluhur mereka, khususnya tradisi Konghucu atau Tao. Para orangtua mereka juga enggan untuk mengenalkan

³⁰*Ibid.*,

kembali tradisi leluhur dan budaya Tionghoa kepada anak-anak mereka karena mereka tidak mau meneruskan pengalaman masa lalu yang memprihatinkan bagi komunitas mereka. Itu merupakan dampak terbesar yang mereka rasakan.³¹

Salah satu tempat yang boleh menampilkan perayaan pesta agama dan adat istiadat Tionghoa adalah di Semarang. Kota Semarang mendapatkan dispensasi untuk mengadakan pertunjukan seperti barongsai, arak-arakan namun tetap meminta surat izin dari pihak yang berwajib. Saat itu Semarang juga merupakan satu-satunya kota yang boleh mempertunjukkan barongsai. Orang-orang keturunan Tionghoa di kota Semarang patut berterima kasih kepada Oei Tik Liong (Soetikno)³², yang merupakan sahabat sekaligus orang terdekat dan mempunyai hubungan baik dengan Soeharto.³³ Berkat Soetikno, orang-orang keturunan Tionghoa mempunyai sedikit kebebasan dalam melaksanakan ritual

³¹Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

³²Oei Tik Liong adalah orang Tionghoa kelahiran Semarang yang dulu pernah satu angkatan pada saat belajar akademi militer di Magelang dengan Soeharto. Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

³³Kedekatan Soeharto dengan para pengusaha Tionghoa berkaitan dengan birokrasi yang berjalan di Indonesia ketika itu yaitu birokrasi patrimonial. Dalam birokrasi patrimonial, individu dan golongan yang berkuasa mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka. Investasi-investasi yang mengalir masuk akan mendapatkan jaminan keamanan dengan perlindungan dari patron-patron yang berkuasa di kalangan elit pemerintah. Lihat: Jahja A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980* (Jakarta: LP3ES, 1990). Soeharto, yang saat itu adalah pemegang kekuasaan utama di Indonesia, menjadi patron paling kuat dan memberikan perlindungan kepada pengusaha, bawahan dan orang-orang yang loyal kepadanya. Sebagai balasannya, pengusaha, bawahan dan orang-orang yang mendapat perlindungan tersebut juga akan memberikan dukungan kepadanya. Hubungan timbal-balik antara pemerintah dan para pengusaha Tionghoa pun memiliki dampak yang berarti bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

kebudayaannya. Beliau sangat berjasa sekali bagi Soeharto karena membantu Soeharto saat menjadi Komandan Divisi Diponegoro di Semarang.³⁴

Saat Soeharto terlibat masalah yang berat³⁵, Oei Tik Liong mengakui bahwa Soeharto adalah temannya. Saat itu juga kedudukan Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro dicopot karena adanya dugaan keterlibatan Soeharto dalam masalah tersebut. Akan tetapi Soeharto terhindar dari sanksi yang lebih berat.³⁶ Soeharto kemudian dipindah ke Bandung untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD).³⁷ Hubungan baik antara Oei Tik Liong dan Soeharto itu membuat perayaan-perayaan seperti *Sam Poo Besar* (perayaan kedatangan Cheng Ho) dari Kelenteng Tay Kak Sie di Gang

³⁴Sekarang Pangdam IV Diponegoro. Wawancara dengan Liong Hwa Hing pada 17 September 2013.

³⁵Pada periode 1950-an, di Jawa Tengah terjadi kejahatan terorganisasi berupa penyelundupan besar-besaran, penggelapan barang-barang milik perusahaan negara, manipulasi dump kendaraan bermotor milik Divisi Diponegoro dan pungutan liar atas barang-barang kebutuhan rakyat. Para pelakunya terdiri dari oknum-oknum militer dan sipil, terorganisasi dengan baik. Pelaksana utamanya antara lain Liem Siu Liong, Thee Kian Seng (Bob Hasan) dan Oei Tik Liong (Sutikno) yang merupakan pedagang besi tua. Kolonel Soeharto, Panglima Divisi Diponegoro waktu itu dikabarkan terlibat. Beliau diisukan sebagai koruptor beras, memperkaya diri dari hasil barter gula. Kemudian beliau dipanggil untuk menghadap pimpinan Angkatan Darat yaitu Jenderal Gatot Soebroto sebagai wakil KASAD. Lihat: Endik Koeswoyo, *Siapa Memanfaatkan Letkol. Untung?* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 84-85. Lihat juga; G. Dwipayana, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi* (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 1989), hlm. 92.

³⁶Hal ini terjadi atas campur tangan Gatot Soebroto, tokoh militer senior yang juga ayah angkat Bob Hasan. Gatot Soebroto memutuskan tidak ada yang diragukan dan disalahkan atas tindakan Soeharto. Oleh karena itu beliau tidak dikenakan sanksi. Lihat: Koeswoyo, *op. cit.*, hlm. 85. Lihat juga: Dwipayana, *op. cit.*, hlm. 92.

³⁷*Ibid.*,

Lombok Pecinan hingga ke Kelenteng Sam Poo Kong di Simongan Semarang masih bisa dilakukan setiap tahunnya.³⁸

Perayaan Cheng Ho pada saat itu mendapatkan izin khusus dari pemerintah setempat. Arak-arakannya (kirab) dilakukan dengan cara menaikkan patung dewa atau *toapekong*³⁹ ke atas kendaraan dari kelenteng Tay Kak Sie menuju ke Simongan. Pada saat itu arak-arakannya juga tidak boleh dilakukan beramai-ramai (rombongan) dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, perayaan tersebut tidak melibatkan banyak orang. Setelah *toapekong* disembahyangkan kemudian dinaikkan kendaraan lagi, lalu dikembalikan lagi ke kelenteng Tay Kak Sie. Orang-orang keturunan Tionghoa wajib melakukan perayaan Cheng Ho karena menurut mereka Cheng Ho bisa dikatakan sebagai penjaga Semarang.⁴⁰

Selama masa Orde Baru, perayaan tersebut bisa berlangsung terus menerus setiap tahunnya dan tetap menggunakan izin dari pemerintah. Mereka juga tetap harus membayar sejumlah uang tertentu untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan izin tersebut. Untuk mengurus surat izin tersebut tidak hanya dilakukan di satu tempat saja. Mereka harus mengurus ke bagian sosial politik, mulai dari kepolisian, pemerintah kota, dan masih banyak lagi.⁴¹

³⁸Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

³⁹*Toapekong* wujudnya patung serupa dengan patung-patung lainnya, tetapi patung yang dihormati, dipuja, dan dipercayai oleh orang-orang Tionghoa dan diletakkan di atas meja. Lihat: Soemardi dan Kwik Siong Koei, *Buku Menjongsong Perajaan Sam Poo Besar* (Semarang: Kawan, 1957), hlm. 33.

⁴⁰Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

⁴¹Wawancara dengan Kwa Tong Hay pada 7 September 2013.

Soeharto memutuskan hubungan diplomatik dengan Tiongkok karena orang-orang keturunan Tionghoa diduga menjalin hubungan yang erat dengan komunis Tiongkok, lalu mengimplementasikan kebijakan asimilasi yang mengakibatkan erosi bahasa dan budaya Tionghoa. Penutupan organisasi dan sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa terkait dengan kebijakan asimilasi ini.⁴²

Kendati dibayang-bayangi oleh penindasan budaya dan bahasa dan juga kerusuhan anti-Tiongkok di tahun 1965, orang Tionghoa di Indonesia patuh pada kebijakan asimilasi Soeharto. Mereka mundur dari aktivitas-aktivitas politik dan menjalankan adat-istiadat dan tradisi mereka dalam lingkup keluarga saja. Pada tahun 1975-1998 semua anak keturunan Tionghoa masuk dalam sekolah-sekolah berbahasa Indonesia. Anak-anak keturunan Tionghoa mempelajari sejarah Indonesia dan berbaur dengan kawan sebaya mereka yang orang Indonesia di sekolah-sekolah ini. Hal ini menyebabkan adanya sebuah generasi Tionghoa yang tidak berbahasa Tionghoa lagi, dan tidak mengenal kebudayaan Tionghoa. Kebanyakan orang-orang keturunan Tionghoa yang lahir sesudah tahun 1966, hanya dapat berbicara, menulis, dan membaca Bahasa Indonesia.⁴³

Orang-orang keturunan Tionghoa tokoh sangat berkembang dalam pendidikan. Setelah tahun 1967 ada peraturan bahwa orang-orang Tionghoa yang sudah menjadi WNI tidak boleh bersekolah di sekolah asing. Jadi saat itu mereka membuat sekolah sendiri namun tetap berorientasi pada sekolah nasional. Sekolah

⁴²Aimee Dawis, 'Orang Tionghoa Berorganisasi: Yang Kini Lanjutan Dari Masa Lalu?', dalam I. Wibowo dan Thung Ju Lan, editor, *op. cit.*, hlm. 58-59.

⁴³Dawis, *op. cit.*, hlm. 29.

itu bernama *Tiong Hoa Hwee Koan*⁴⁴ (THHK) yang terletak di Pecinan Semarang tepatnya di Jalan Plampitan nomor 35 Semarang (sekarang menjadi SMP 36 Semarang) dan *Hoa Ing Tiong Hak*⁴⁵ (yang sekarang menjadi SMA 5 Semarang). Sekolah-sekolah Tionghoa menjadi sebuah tempat untuk proses pembentukan asimilasi. Akan tetapi, sekolah-sekolah Tionghoa itu mulai ditutup setelah keluarnya Instruksi Presiden tersebut pada masa Orde Baru.⁴⁶ Hal ini dikarenakan sekolah-sekolah yang dikelola oleh orang Tionghoa kurang menguntungkan dalam proses asimilasi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah-sekolah yang dikelola orang Tionghoa sangat berorientasi pada negeri leluhur.⁴⁷ Semua orang-orang keturunan Tionghoa peranakan kemudian masuk ke sekolah negeri atau sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan Katholik dan Kristen.

Selama masa Orde Baru, kesenian barongsai dilarang tampil di tempat umum di seluruh wilayah di Indonesia. Satu-satunya kota yang boleh

⁴⁴*Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) adalah sekolah pertama yang diperuntukkan untuk mengedukasi anak-anak Tionghoa dan sekaligus sebagai lembaga transfer kultur dan pemikiran Tionghoa. Akan tetapi, sekolah THHK pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan tidak lagi dipertahankan. Lihat: Etik Mahareni D. P., *op. cit.*, hlm. 15.

⁴⁵*Hoa Ing Tiong Hak* didirikan pada tanggal 15 Maret 1916 dengan lokasi awal di Gang Tengah. Pendirian *Hoa Ing Tiong Hak* tersebut dengan maksud agar para lulusan dari *Tiong Hoa Hwee Koan* (Sekolah Dasar Tionghoa) yang sebelumnya telah berdiri dapat melanjutkan pendidikan mereka. Setelah beberapa lama menempati di kawasan yang saat ini disebut Pecinan, *Hoa Ing Tiong Hak* pindah di Jalan Bodjong yang kala itu telah berkembang. Lihat: Edy Muspriyanto, *et al.*, *Semarang Tempo Doeloe: Meretas Masa* (Semarang: Terang Publishing, 2006), hlm. 104.

⁴⁶Wawancara dengan Kwa Tong Hay pada 7 September 2013.

⁴⁷Dwi Ratna Nurhajarini, 'Asimilasi Tionghoa di Kota Pasuruan', dalam *Jurnal Patrawidya*, Vol. 13, No. 4, Desember 2012 (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 2012), hlm. 708.

mempertunjukkan barongsai pada masa itu adalah Semarang. Hal ini juga karena adanya hubungan baik antara Oei Tik Tiong dengan Soeharto.

Di Semarang ada perkumpulan barongsai yang tertua dan terkenal bernama *Hoo Hap*.⁴⁸ Selama masa Orde Baru perkumpulan ini tetap eksis mempertunjukkan kesenian barongsai baik di dalam maupun di luar kota. Perkumpulan *Hoo Hap* tetap dapat mempertahankan eksistensinya dalam mempertunjukkan kesenian barongsai meskipun pada saat itu muncul peraturan pemerintah yang kurang memberi tempat bagi warga keturunan Tionghoa.⁴⁹ Mereka tetap menaati peraturan pemerintah dan menyikapi kondisi tersebut dengan bijaksana. Setiap akan mengadakan pertunjukan baik di dalam ataupun di luar Kota Semarang, perkumpulan tidak lupa meminta surat izin kepada pihak kepolisian maupun pemerintah daerah tersebut, sehingga keamanan dan ketertiban umum dapat terjamin.⁵⁰

Adanya Inpres No. 14/1967 juga membuat kesenian-kesenian Tionghoa seperti wayang potehi tidak dapat dipentaskan secara terbuka. Pementasan

⁴⁸*Hoo Hap* berdiri pada tahun 1923. Gedung perkumpulan ini berada di Jalan Jagalan 88 A Semarang. Perkumpulan *Hoo Hap* ini terkenal dengan permainan seni liong dan samsi (barongsai). Lihat: Panitia H.U.T. Ke- 50 Hoo Hap Hwee Kwan Semarang, *Buku Peringatan H.U.T. ke- 50 (1923-1973) Hoo Hap Semarang* (Semarang: Yayasan Hoo Hap Hwee Kwan Semarang, 1973), hlm. 20-24.

⁴⁹Wawancara dengan Bambang Sutikno pada 8 September 2013.

⁵⁰Wawancara dengan Bambang Sutikno pada 8 September 2013.

wayang potehi harus menggunakan izin dari pemerintah.⁵¹ Selama masa Orde Baru, wayang potehi hanya dipentaskan di tempat-tempat yang diizinkan seperti di kelenteng. Kesenian Tionghoa yang dapat dipentaskan secara terbuka saat itu adalah kesenian barongsai. Adanya Instruksi Pemerintah yang dikeluarkan pada masa Orde Baru membuat kesenian Tionghoa khususnya wayang potehi menjadi luntur dan terancam punah karena tidak ada generasi muda yang dapat memainkannya.

Pada masa Orde Baru, Imlek belum menjadi hari libur nasional. Kebanyakan orang Tionghoa di Pecinan Semarang tidak dapat merayakan dan berkumpul bersama keluarga karena ada anggota keluarganya yang masuk kerja, masuk sekolah. Penyambutan Imlek oleh orang-orang keturunan Tionghoa juga tidak dilakukan secara meriah karena suasana saat itu terasa tidak nyaman sehingga mereka tidak dapat menikmati kegembiraan bersama-sama.⁵² Akan tetapi mereka tetap merayakan Imlek, dan bersembahyang di kelenteng atau rumah mereka masing-masing.

⁵¹Salah satu dalang wayang potehi di Pecinan Semarang bernama Bambang Sutrisno menggunakan surat jalan untuk bepergian ke luar kota saat ia dan rombongan kelompok keseniannya hendak mementaskan wayang potehi pada masa pemerintahan Orde Baru. Surat jalan ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penanda bahwa si pembawa surat tidak terlibat dalam partai terlarang dan tragedi kudeta militer pada 30 September 1965 (G-30-S). Lihat: Anastasia Dwirahmi, "Bukan Sekedar Potehi", (*online*), (<http://anastasiadwiraahmi.wordpress.com/2010/07/03/bambang-sutrisno-babak-pertama/>), diunduh pada 8 Oktober 2013).

⁵²Budi Maryono, 'Harapan dari Ujung Gang', dalam *Suara Merdeka*, Edisi Imlek 2555, Sabtu Pon, 17 Januari 2004, hlm. 12.

C. Dampak Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 Terhadap Kehidupan Budaya & Ekonomi Keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang

1. Dampak Budaya

a. Penggantian Nama

Salah satu ketentuan pemerintah dalam rangka menerapkan politik asimilasi atau pembauran terhadap orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia adalah penggantian nama. Penggantian nama mengacu pada Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa.⁵³ Keputusan ini yang menentukan bahwa untuk meyakinkan bangsa Indonesia akan tekad mereka kepada Indonesia, orang Tionghoa dihimbau untuk mengganti namanya dengan nama Indonesia.⁵⁴ Keputusan ini berkaitan dengan prosedur yang sangat mempermudah etnis Tionghoa yang ingin ganti (secara sukarela) dengan nama Indonesia. Hampir semua WNI-Tionghoa mengganti nama mereka menjadi nama Indonesia setelah keputusan ini dikeluarkan.⁵⁵ Hal itu bukannya memberikan jati diri yang kuat, tetapi itu justru menciptakan kebingungan bagi orang-orang keturunan Tionghoa.⁵⁶

Penggantian nama pada saat itu berhubungan dengan SBKRI. Pemakaian SBKRI dalam mengurus hal-hal administrasi bagi orang Tionghoa adalah hal yang penting. Keturunan Tionghoa yang akan masuk sekolah atau mengurus

⁵³Lihat Lampiran D.

⁵⁴Dawis, *op. cit.*, hlm. 28-29.

⁵⁵Jahja, dalam Hamzah, editor, *op. cit.*, hlm. 86-87.

⁵⁶Dawis, *op. cit.*, hlm. 29.

surat-surat kependudukan diwajibkan melampirkan SBKRI.⁵⁷ Hal itu juga dilakukan apabila mereka ingin mengurus pasport untuk pergi keluar negeri dan meminta izin dagang (usaha) kepada pemerintah daerah. Mereka harus dapat menunjukkan SBKRI. Pemerintah daerah akan menanyakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) karena nama yang tertera di SBKRI adalah nama Tionghoa.⁵⁸ Prosesnya saat itu harus mengurus di Pengadilan, dengan membayar sejumlah uang tertentu.⁵⁹

Orang-orang keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang rata-rata merespon dengan baik peraturan ganti nama tersebut. Sebagian besar orang-orang Tionghoa mengetahui dan melaksanakannya. Akan tetapi, tetap saja ada beberapa golongan kecil yang lebih memilih untuk mempertahankan nama asli mereka, yang merepresentasikan kebanggaan dan loyalitas terhadap budaya leluhur dan mengambil resiko kehilangan hak sebagai WNI.⁶⁰ Sebagian besar yang menggunakan nama Indonesia adalah warga yang berusia antara 0-54 tahun.

Peraturan ganti nama di Semarang ternyata selain menimbulkan generasi keturunan Tionghoa dengan nama Indonesia, juga memunculkan generalisasi

⁵⁷Mudjijono, 'Komunitas Etnis: Perkumpulan dan Kegiatannya: Studi Kasus Muslim Tionghoa di Kota Semarang Jawa Tengah', dalam *Jurnal Patrawidya* Vol. 8 No. 2 (Dewan Redaksi Patrawidya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 2011), hlm. 422.

⁵⁸Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

⁵⁹Wawancara dengan Kwa Tong Hay pada 7 September 2013.

⁶⁰Mohammad Garaudy Guntur Pramana, "Pelaksanaan Penggantian Nama Tionghoa dan Pengaruhnya Terhadap Usaha Mencapai Kesetaraan Sosial di Kalangan WNI Keturunan Tionghoa di Kelurahan Jagalan Semarang" (Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 80.

dalam penggunaan nama. Pada saat pemerintah Indonesia mengeluarkan anjuran ganti nama, pemerintah juga mengeluarkan beberapa nama yang bisa digunakan oleh orang-orang keturunan Tionghoa.⁶¹ Umumnya nama-nama tersebut menggunakan bahasa Indonesia ejaan lama mengandung unsur dari bahasa Jawa dan lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu. Orang-orang keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang memilih nama dengan beberapa pertimbangan yaitu menggunakan nama pilihan sendiri (biasanya menyelipkan karakter marga mereka dalam nama Indonesia), mengkombinasikan dengan nama dari istilah Jawa atau Indonesia dan mengganti keseluruhan nama dengan nama-nama Katholik/Kristen (nama baptis) dan nama-nama Barat. Hal ini memberikan pengaruh dalam penggunaan nama karena orang-orang keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang sudah banyak yang menjadi pemeluk agama Katholik dan Kristen.⁶²

Pada penggunaan nama Jawa, ada kecenderungan nama tersebut digunakan pada orang-orang keturunan Tionghoa yang berumur 50 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa anjuran pemerintah untuk menggunakan nama Jawa cukup diterima oleh sebagian besar orang-orang keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang. Akan tetapi tidak semua orang-orang keturunan Tionghoa begitu saja menerima anjuran pemerintah mengenai nama Jawa ini. Beberapa dari mereka juga telah merencanakan menggunakan nama Jawa dengan berbagai alasan. Mereka mengganti namanya dengan nama Jawa karena lingkungannya sebagian

⁶¹Pramana, *op. cit.*, hlm. 83.

⁶²Pramana, *op. cit.*, hlm. 84.

besar adalah orang Jawa, bukan untuk tujuan asimilasi atau agar lebih bisa diterima oleh orang Jawa. Mereka menggunakan nama Jawa karena nama Jawa yang saat itu familiar di dalam benak mereka.⁶³

Beberapa cara yang digunakan orang-orang keturunan Tionghoa dalam memilih dan menggunakan nama Jawa antara lain (1) memilih nama Jawa yang memiliki karakter marga keluarga mereka. Contohnya: Liem Djai Ling menjadi Salim Drajat, keluarga dari marga Tan menjadi Tanoedibjo, dan lain-lain. Orang Tionghoa yang memilih nama tersebut biasanya tidak ingin menghilangkan nama marganya; (2) memilih nama Jawa yang mempunyai makna yang sama dengan nama Tionghoa mereka. Contohnya: Ong Kha Seng yang artinya keluarga yang sukses, memilih nama Jawa Rahardi Trisno Santoso. Ada juga yang nama keluarganya berasal dari marga Liem. Dalam bahasa Cina, Liem berarti hutan. Kemudian kata hutan ini dibuat dalam bahasa Jawa krama inggil yaitu wono. Nama orang keturunan Tionghoa tersebut menjadi Wonodirdjo⁶⁴, dan lain-lain; (3) memilih nama Jawa tanpa pertimbangan alasan khusus.

Kebanyakan orang-orang keturunan Tionghoa yang menggunakan nama ini adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang tidak tahu-menahu perihal pergantian nama. Mereka terlahir sudah dengan nama Indonesia atau saat beranjak dewasa mereka sudah disiapkan nama Jawa sebagai ganti nama Tionghoa mereka. Contohnya: Huang Cai Feng menjadi Bambang Soegiarto, dari marga Chang yang

⁶³Pramana, *op. cit.*, hlm. 86.

⁶⁴Wawancara dengan Kwa Tong Hay pada 7 September 2013.

kemudian menjadi Changianto, adapula yang namanya dari marga Shan menjadi Santoso⁶⁵, dan lain-lain.

Pada periode 1960-1970an masih banyak digunakan nama-nama Jawa seperti Sri, Soetikno, Rahardjo, dan lain-lain. Sedangkan pada periode 1970-1980an nama Budi, Eko, Bambang, Endang, dan Joko adalah nama yang cukup populer digunakan oleh orang Tionghoa di Pecinan Semarang. Contohnya adalah Tong Siang Ben menjadi Joko Susanto, dan lain-lain.

Pemilihan nama Indonesia hampir sama dengan pemilihan nama Jawa sebagai ganti nama Tionghoa. Tujuan utama pemilihan nama tersebut adalah agar lebih mudah dalam mengurus administrasi. Cara yang digunakan hampir sama dengan pemilihan nama Jawa, yaitu (1) memilih nama Indonesia yang memiliki karakter marga dari suatu keluarga Tionghoa. Orang Tionghoa biasanya memilih nama Indonesia yang hampir mirip dengan nama marga dan nama individunya. Kemiripan ini tidak perlu harus sama karena yang dijadikan acuan hanya bagian marga dari suatu nama Tionghoa. Contohnya Am Yo menjadi Amin Cahyono, Li Chun Lai menjadi Ali Prasodjo, Can menjadi Candra, Lim menjadi Salim; (2) memilih nama Indonesia yang memiliki makna yang sama dengan nama Tionghoa. Contohnya Kwa Tong Hay menjadi Hendrawan, Liong Hwa Hing menjadi Henry Hermawan, Tio Tek Gwan menjadi Dedi Budiharto, Thio Tiong Gie menjadi Teguh Chandra Irawan, dan lain-lain; (3) memilih nama Indonesia

⁶⁵Pramana, *op. cit.*, hlm. 87.

dari orang-orang populer di zaman itu. Contohnya The Jam Hum menjadi Rudy Hartono, dan lain-lain.⁶⁶

Selain menggunakan nama Jawa dan Indonesia, beberapa warga keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang juga ada yang menggunakan nama Barat. Pertimbangannya adalah karena nama Barat dianggap lebih *prestise* daripada nama Indonesia atau Jawa. Contohnya Steffany, Kevin, Robert, David, dan lain-lain. Nama-nama Barat ini mendominasi nama-nama orang Tionghoa yang lahir tahun 1980 sampai saat ini. Generasi yang lahir pada periode 1980-an masih ada yang mempertahankan nama marganya yang sudah diindonesiakan, kemudian diletakkan di belakang nama depannya yang Barat. Misalnya Deby Susanti Bintoro, dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan nama ayahnya yang sudah menjadi nama Indonesia tetapi bukan nama marga. Contohnya nama ayah adalah Handoyo, nama anak kandungnya Robbie Handoyo dan Ferry Handoyo.⁶⁷

Orang Tionghoa di Pecinan Semarang cukup banyak yang beragama Katholik dan Kristen. Mereka juga menggunakan nama baptis untuk penggantian nama, seperti Maria, Albertus, Stefanus, dan lain-lain. Ada juga yang menggabungkan nama Jawa dan nama Katholik/Kristen (nama baptis). Contohnya Chen Han Xie menjadi Fransiskus Chondrohardjo, dan lain-lain. Penggunaan nama ini lebih menitikberatkan pada kandungan makna yang baik dan simbol dari suatu golongan agama tertentu, dalam hal ini adalah agama Katholik/Kristen.⁶⁸

⁶⁶Pramana, *op. cit.*, hlm. 88.

⁶⁷*Ibid.*,

⁶⁸Pramana, *op. cit.*, hlm. 89.

Pada periode tahun 1970-an, penggunaan nama Indonesia di kalangan orang Tionghoa di Semarang mulai tampak jelas mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat terutama pada kelurahan Jagalan yang merupakan kelurahan dengan jumlah WNI keturunan Tionghoa terbanyak. Hingga tahun 1998, sebagian besar warga keturunan Tionghoa di Jagalan sudah menggunakan nama Indonesia.⁶⁹

Sebagian besar masyarakat keturunan Tionghoa memang sudah mengganti nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia. Mereka memang harus merelakan nama leluhurnya diganti dengan nama baru yang lebih Indonesia. Bagi keturunan Tionghoa yang mendukung asimilasi hanya menganggap penggantian nama tidak lebih dari sekedar meng-Indonesia-kan nama Tionghoa mereka, karena arti dan pengharapan yang terkandung dalam nama Indonesia sama dengan nama Tionghoa. Akan tetapi, perubahan nama Tionghoa menjadi nama Indonesia yang telah dilakukan oleh sebagian besar keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang menunjukkan bahwa nama Indonesia tersebut tidak dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sikap masyarakat pribumi terhadap orang-orang keturunan Tionghoa cenderung ke arah prasangka negatif. WNI keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang yang menggunakan nama Indonesia atau Jawa seringkali harus menerima tuduhan bahwa nama mereka hanya digunakan sebagai kedok saja agar mereka dapat terus tinggal di Indonesia.⁷⁰

Penggantian nama di kalangan WNI keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang belum efektif untuk menuju kesatuan bangsa Indonesia. Penggantian

⁶⁹Pramana, *op. cit.*, hlm. xix.

⁷⁰Pramana, *op. cit.*, hlm. 117.

nama belum menjamin rasa kebangsaan Indonesia di kalangan WNI keturunan Tionghoa. Anjuran penggantian nama tidak menjamin dalam waktu singkat penyelesaian masalah minoritas dengan bijaksana dan hapusnya praktek-praktek diskriminasi rasial.⁷¹

b. Penyelenggaraan Upacara Tradisi Keagamaan

Orang Tionghoa yang datang ke Indonesia setelah abad ke- 15, di samping adat dan kebiasaan lain, juga membawa agama mereka. Orang-orang Tionghoa membawa agama *Sam Kauw* (berasal dari bahasa Hokkian, Sam= tiga, Kauw= agama) yang mengandung tiga unsur yaitu agama Budha, agama Konghucu, dan agama Tao, yang kemudian berdiri sendiri-sendiri, tetapi banyak persamaan di antara ketiganya. Konghucu memang dilarang (tidak diakui). Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Konghucu adalah agama, adapula yang mengatakan bahwa Konghucu merupakan suatu ajaran. Akan tetapi, sebagian besar orang-orang keturunan Tionghoa mengatakan bahwa Konghucu itu adalah agama. Konghucu sebenarnya adalah ajaran dari Nabi Konghucu. Misalnya ajaran-ajaran tentang kebaikan, jangan menyakiti orang lain bila tidak ingin disakiti dan lain-lain. Ajaran itu dekat dengan agama Budha.⁷²

Kehadiran agama-agama yang dibawa oleh orang Tionghoa ini ternyata tidak selalu mendapatkan sambutan baik oleh negara, terutama setelah Indonesia merdeka. Ada upaya-upaya untuk mengelola dan mengaturnya. Begitu pula dengan dua agama yang diakui secara resmi, yaitu agama Budha dan agama

⁷¹Yayasan Tunas Bangsa, *op. cit.*, hlm. 67.

⁷²Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

Konghucu. Keduanya terkait dengan kelompok etnis Tionghoa yang merupakan penganut mayoritas dari agama-agama itu. Rezim Soeharto beranggapan bahwa agama Konghucu dan *Sam Kauw* (Tridharma)⁷³ merupakan suatu “rintangan” dari kebijakan asimilasi, tetapi tidak bisa menghapusnya begitu saja karena ideologi Pancasila yang masih dianut oleh Pemerintah Indonesia.

Agama Konghucu sudah dikenal di Indonesia sebelum abad ke- 19, tetapi belum berupa sebuah agama yang terorganisasi.⁷⁴ Sebelum Perang Dunia II, agama Konghucu belum menjadi sebuah agama yang terorganisasi seperti sekarang. Selama 11 tahun sesudah Soeharto memegang kekuasaan, rezim yang baru menyambut baik agama Konghucu. Sejak tahun 1978, pemerintah mulai menjaga jarak terhadap agama Konghucu. Pada akhir tahun 1978, Menteri Dalam Negeri menerbitkan sebuah surat edaran, yang hanya mengakui lima agama, tidak

⁷³Istilah Tridharma (3 agama) adalah nama baru dari Sam Kauw. Tridharma berasal dari kata Tri dan Dharma. Tri berarti “tiga” dan Dharma berarti “ajaran kebenaran”. Jadi Tridharma berarti tiga ajaran kebenaran, yaitu Sakyamuni Buddha, ajaran Nabi Khong Hu Cu, dan ajaran Nabi Lo Cu. Tridharma merupakan agama yang penghayatannya menyatu dalam ajaran Buddha, Khong Hu Cu dan Lo Cu. Ketiga ajaran tersebut sama, tidak dicampur-aduk dan tetap berpegang pada kitab suci masing-masing. Lihat: Wikipedia, “Tridharma”, (*online*), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Tridharma>, diunduh pada 24 Februari 2014).

⁷⁴Pada tahun 1923 berbagai organisasi dengan ciri Konfusian berkumpul di Yogyakarta untuk mengadakan kongres. Hasilnya adalah berdirinya Organisasi Umum *Khong Kauw Hwee*. Pada masa inilah konsep “Tian” (langit) sebagai allah dari agama Tionghoa dan Konghucu (Konfusius) sebagai nabi diterapkan untuk pertama kali. Tahun 1967 organisasi tersebut mengadakan Kongres keenam. Pada saat itu nama perkumpulan agama *Khong Kauw Hwee* ditetapkan menjadi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin). Istilah Tionghoa “*Khong Kauw*” diganti menjadi agama Konghucu. Sejak saat itu agama Konghucu diubah menjadi agama Indonesia yang sejati. Lihat: Leo Suryadinata, ‘Akhirnya Diakui: Agama Konghucu dan Agama Budha Pasca Soeharto’, dalam Wibowo dan Lan, *op. cit.*, hlm. 80-82.

termasuk agama Konghucu. Pada awal tahun 1979 Kabinet Soeharto juga menerbitkan sebuah surat keputusan yang mengatakan bahwa agama Konghucu bukan agama.

Sejak tahun 1979 agama Konghucu tidak lagi ditemukan dalam kartu tanda penduduk orang Indonesia. Para penganut agama Konghucu harus didaftarkan sebagai penganut agama Budha. Hal itu disebabkan ajaran agama Budha dan Konghucu saling berkaitan sehingga mayoritas orang Tionghoa berpindah ke agama Budha.⁷⁵ Ketika mereka menikah, penganut agama Konghucu harus didaftarkan sebagai pasangan beragama Budha dalam dokumen perkawinan agar diakui oleh negara. Meskipun demikian, hal itu tidak menimbulkan protes karena dua alasan. Pertama, para penganut agama Konghucu takut akan penindasan pemerintah. Kedua, sangat mungkin agama Budha di Indonesia dijalankan secara liberal sehingga dapat mencakup penganut agama Konghucu bahkan agama Tridharma.⁷⁶

Kebijakan asimilasi terhadap orang-orang keturunan Tionghoa didefinisikan dari sudut upaya untuk menghapus komponen Tionghoa dari kebudayaan Indonesia, maka tidak mengherankan apabila tidak lama setelah agama Konghucu tidak diakui sebagai agama, pemerintah mulai membina agama Budha. Pada rezim Soeharto, agama Budha lebih berciri Indonesia dibandingkan dengan agama Konghucu. Banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang memeluk agama Konghucu sebenarnya tidaklah murni pengikut Konghucu.

⁷⁵Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

⁷⁶Suryadinata, dalam Wibowo dan Lan, *op. cit.*, hlm. 84-85.

Mereka adalah pengikut *Sam Kauw*, campuran agama Konghucu, Tao dan Budha.⁷⁷ Tempat ibadah orang-orang Tionghoa ini memiliki semua karakteristik yang dimiliki oleh tiga agama ini. Tempat ibadah itu dinamakan kelenteng.⁷⁸ Sementara agama Budha bisa berkembang selama masa Soeharto, agama Konghucu tidak diakui dan tidak diizinkan berkembang. Tahun 1979-1998 agama Konghucu tidak diakui dan kebijakan asimilasi semakin ditingkatkan. Akibatnya, banyak orang-orang keturunan Tionghoa berpindah ke agama Budha atau agama lain. Sesungguhnya sejak kudeta 1965 banyak orang-orang keturunan Tionghoa beralih memeluk agama Protestan atau Katholik selain agama Budha.⁷⁹

Beberapa kelenteng yang ada di kawasan Pecinan Semarang pada umumnya mempunyai tiga macam aliran sesuai dengan dewa utama yang dipuja. Dewa utama yang dipuja di kelenteng Tao merupakan dewa aliran Tao, terutama *Hok Tek Tjeng Sien*. Kelenteng yang termasuk dalam aliran ini adalah kelenteng Sioe Hok Bio, Tek Hay Bio, Tong Pek Bio⁸⁰, Hoo Hok Bio, dan See Hoo Kiong. Kelenteng Tay Kak Sie merupakan kelenteng Budha, sehingga Dewa utama yang

⁷⁷Ajaran Konfusianisme yang disampaikan oleh Kong Hu Cu menekankan pada tiga unsur, yaitu pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, leluhur dan penghormatan terhadap Kong Hu Cu. Taoisme merupakan ajaran *Lao Tze* yang mengutamakan kesederhanaan dan ketenangan dengan tujuan utama tercapainya *wu* atau kehampaan. Taoisme mengajarkan mengenai keseimbangan yang disimbolkan dengan *Yin Yang*. Budhisme merupakan ajaran Budha dari India dan mengajarkan kepercayaan akan kehidupan setelah mati dan kelahiran kembali (*reinkarnasi*). Lihat: Titiek Suliyati, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 70.

⁷⁸Suryadinata, dalam Wibowo dan Lan, *op. cit.*, hlm. 83-85.

⁷⁹Suryadinata, dalam Wibowo dan Lan, *op. cit.*, hlm. 100.

⁸⁰Gambar lengkap tentang Kelenteng Tong Pek Bio lihat pada lampiran A, gambar 3.

dipuja merupakan dewa aliran Budha. Kelenteng yang terdapat di Pecinan Semarang sebagian besar merupakan kelenteng dengan aliran Tao dan dapat diidentifikasi dari namanya yang memakai kata *Bio* atau *Kiong*. Kelenteng yang beraliran konfusius tidak terdapat di Pecinan Semarang.⁸¹

Kelenteng Tay Kak Sie di Pecinan Semarang merupakan salah satu contoh kelenteng yang pada mulanya diperuntukkan bagi Yang Mulia Dewi Welas Asih *Koan Sie Im Po Sat* (bahasa Sansekerta disebut *Avalokitesvara Boddhisattva*), lalu kemudian berkembang menjadi sebuah kelenteng besar yang juga memuja berbagai Dewa-Dewi aliran Tao dan Konfusianisme, jadi tidak hanya para Dewa dari aliran Budha saja.⁸² Kelenteng Tay Kak Sie meskipun telah melewati empat zaman (zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan Orde Baru), tidak pernah mengalami kerusakan berarti. Pada masa Orde Baru, umat Tridharma mengalami kesulitan beribadah karena pemerintah pada masa itu melarang segala bentuk hal yang berkaitan dengan budaya Tionghoa. Oleh karena itu, umat Tridharma terpaksa beribadah dan mengunjungi kelenteng secara sembunyi-sembunyi. Mereka merasa ketakutan karena jika ketahuan datang ke

⁸¹Suliyati, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 74.

⁸²Kelenteng Tay Kak Sie merupakan kelenteng yang bernafaskan Buddhisme, yang berarti kuil kesadaran agung. Pada mulanya memang kelenteng Tay Kak Sie didirikan dengan tujuan untuk memuja *Koan Im Po Sat* yang berasal dari aliran Buddhisme. Sedangkan sebutan *Sie* adalah istilah yang khusus dipakai untuk kuil-kuil Budha. Lihat: Gan Kok Hwie dan Kwa Tong Hay, *Buku 600 tahun Pelayaran Muhibah Zheng He (262 tahun Tay Kak Sie)* (Semarang: tanpa penerbit, 2005), hlm. 115.

kelenteng untuk beribadah, mereka akan dikenakan hukuman oleh pemerintah pada saat itu.⁸³

Warna campuran antara Buddhisme, Konfusianisme dan Taoisme ini tampak hampir pada semua kelenteng yang ada di Indonesia. Ini menandakan bahwa sesungguhnya kelenteng adalah sesuatu campuran dari tiga aliran utama itu yang secara umum disebut *Sam Kauw* (Tridharma) ditambah kepercayaan yang ada di kalangan masyarakat. Kelenteng Tay Kak Sie mencerminkan *Sam Kauw*, meskipun di ruangan utama tetap dipuja *Tri Ratna Budha*⁸⁴, bersama *Koan Sie Im Po Sat*.⁸⁵

Pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14/1967 pelaksanaan kegiatan keagamaan orang Tionghoa di Pecinan Semarang memang sangat dibatasi. Terlalu banyaknya upacara sembahyangan bagi orang Tionghoa, membuat upacara sembahyangan tersebut hanya boleh dilakukan secara tertutup, tidak boleh ada keramaian dalam bentuk apapun. Pelaksanaan sembahyang tidak

⁸³Bpras, “Klenteng Tay Kak Sie Gang Lombok Semarang”, (*online*), (<http://bpras.com/traveling/semarang/klenteng-tay-kak-sie-gang-lombok-semarang>, diunduh pada 17 Agustus 2013).

⁸⁴Tri Ratna Buddha atau disebut juga *San Bao Fo* yaitu tiga dewa dari aliran Buddhisme yang berasal dari tiga wilayah yaitu *Sejia Mouni Fo*/Buddha Sakyamuni yaitu Siddharta Gautama Buddha; *Yao Si Fo*/Bhaisajya Guru Buddha yaitu Buddha yang mempunyai kemampuan menyembuhkan penyakit dan menyingkirkan pengaruh jahat; *O Mi Tuo Fo*/Amitabha Buddha yaitu Buddha penguasa Firdaus sebelah barat. *Sejia Mouni Fo* berada di tengah mewakili dunia “saha” yaitu dunia derita di mana kita hidup sekarang. *Amitabha Buddha* mewakili wilayah Barat di mana surga Sukhavati berada dan *Yao Shi Fo* mewakili wilayah timur tempat fitrdaus Sphatika. Ketiga dewa ini merupakan dewa yang dipuja di Kelenteng Tay Kak Sie maupun kelenteng lain dari aliran Konfusianisme. Lihat: Hwie dan Hay, *op. cit.*, hlm. 105, 119.

⁸⁵Hwie dan Hay, *op. cit.*, hlm. 120.

perlu menggunakan izin dari pemerintah. Upacara sembahyangan cukup dilakukan di dalam rumah atau di dalam kelenteng saja. Pada masa Orde Baru, saat akan sembahyang atau berdoa di kelenteng, ada pihak aparat yang mengawasi orang Tionghoa di kelenteng tersebut. Hal ini membuat orang Tionghoa yang akan sembahyang atau berdoa di kelenteng merasa tidak nyaman dan tidak bisa leluasa.⁸⁶ Mereka yang melakukan kegiatan sembahyang pada altar-altar leluhur (*kong po*) di rumah juga dilakukan secara diam-diam, dengan kondisi yang penuh kecemasan.⁸⁷ Adanya kebijakan pemerintah Orde Baru yang melarang pementasan kebudayaan Tionghoa, termasuk di dalamnya upacara keagamaan etnis Tionghoa membuat tempat peribadatan menjadi sepi.

Pada setiap rumah orang Tionghoa di Pecinan Semarang biasanya dipasang selebar kertas kuning bertuliskan tulisan Tionghoa (*Hoo*) dan diletakkan di atas pintu. Kertas ini menurut kepercayaan orang Tionghoa bertujuan sebagai tolak bala. Pada masa Orde Baru, orang-orang keturunan Tionghoa tidak berani memasang kertas tersebut. Pemasangan kertas kuning tersebut ada aturannya karena kertas tersebut didapat dari kepercayaan kepada dewa-dewa. Cara mendapatkan kertas tersebut yaitu dengan memohon kepada Dewa yang ada di kelenteng. Kertas tersebut kemudian di upacarakan lalu di tempelkan di atas pintu. Saat akan melepas kertas tersebut juga tidak boleh sembarangan. Orang Tionghoa yang bersangkutan datang ke kelenteng tempat asal mereka mendapatkan kertas kuning tersebut, kemudian berdoa sambil

⁸⁶Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

⁸⁷Saroni Asikin, 'Setelah Ketakutan Menahun Itu', dalam *Suara Merdeka* Edisi Imlek 2555, Sabtu Pon 17 Januari 2004, hlm. 2.

menjelaskan keadaan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta izin untuk melepas kertas tersebut.

Setelah itu dilanjutkan dengan melempar *bun pwee*⁸⁸ untuk mendapatkan jawaban dari Dewa. Jawaban positif (boleh) adalah apabila salah satu kepingan itu terletak dengan bagian yang cekung menghadap ke atas dan yang satu lagi dengan bagian yang cembung menghadap ke atas, tetapi apabila keduanya tergeletak dengan bagian cembung menghadap ke atas, berarti jawabannya negatif (tidak boleh). Kertas kuning tersebut kemudian dilepas lalu dibakar, apabila jawaban tersebut positif (boleh).⁸⁹

2. Dampak Ekonomi

Orang Tionghoa adalah orang yang ulet. Orang-orang Tionghoa yang pergi dari negaranya kebanyakan bekerja sebagai kuli. Mereka datang sendiri, tidak dengan keluarganya dan kemudian berinteraksi dengan penduduk setempat. Sudah sejak dulu mereka mempunyai jiwa dagang. Jiwa dagang itu dipacu lebih hebat lagi pada masa Orde Baru. Sebelum masa Orde Baru (pada masa Soekarno), orang Tionghoa bisa masuk dalam bidang politik, misalnya masuk menjadi polisi dan militer. Tetapi pada masa Orde Baru, kegiatan politik mereka dihentikan, sehingga peluangnya hanya ada di bidang ekonomi.⁹⁰

⁸⁸*Bun pwee* yaitu dua keping kayu yang berbentuk keping biji kacang yang digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan yang dipuja. Untuk memperoleh jawaban dari beliau, kepingan itu dilemparkan ke lantai oleh si pemohon sambil berlutut dan berdoa. Lihat: Hwie dan Hay, *op. cit.*, hlm. 119.

⁸⁹Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

⁹⁰Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

Akibat peraturan yang berlaku pada waktu itu, orang-orang keturunan Tionghoa tidak dapat melakukan kegiatan apa pun di bidang politik. Terjadi sebuah sikap apolitik di kalangan orang-orang keturunan Tionghoa walaupun sikap yang sama tampak pada hampir semua kelompok orang di Indonesia. orang-orang keturunan Tionghoa kemudian mengalihkan kegiatan mereka ke bidang ekonomi, satu-satunya bidang kehidupan yang masih terbuka bagi mereka.⁹¹ Mereka kemudian mengasah dan mendidik anak-anaknya pada bidang ekonomi pula karena pada saat itu hanya terfokus pada bidang ekonomi dan tidak adanya kesempatan dibidang lain. Pada masa Orde Baru, kepandaian orang-orang keturunan Tionghoa di bidang ekonomi lebih terasah lagi.

Tekanan politik dan sosial oleh penguasa Orde Baru terhadap kelompok minoritas ini semakin intensif. Selain partisipasi dalam politik praktis diingkari dan bahkan sama sekali diasingkan dari jajaran birokrasi pemerintahan, orang-orang keturunan Tionghoa juga begitu rentan mendapat cap-cap jelek. Mereka menjadikan orang-orang keturunan Tionghoa sebagai sumber segala masalah atau kambing hitam. Sementara, ketergantungan orang Tionghoa diintensifkan pada lingkaran kekuasaan terutama menyangkut soal jaminan keamanan, perlindungan, dan proteksi ekonomi. Pada saat yang sama mereka tanpa henti menjadi “sapi perah” ekonomi bagi kepentingan kekuasaan dan birokrat.⁹²

⁹¹Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2002).

⁹²Azizazkink, “Manusia dan Kebudayaan”, (*online*), (<http://azizazkink.wordpress.com/2011/02/24/manusia-dan-kebudayaan/>), diunduh pada 19 Februari 2014).

Pada periode 1970-an muncul istilah cukong untuk menyebut orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa kaya raya yang sering bertindak sebagai “kasir” bagi kepentingan aparat dan birokrat. Oleh karena itu, di kemudian hari terutama karena proteksi dan hak-hak monopoli perdagangan warga Indonesia keturunan Tionghoa ini lalu menjadi sungguh-sungguh terampil mengelola bisnis perdagangan. Hal ini memang sejak dulu sudah ada dari masa pemerintah kolonial Belanda, sebuah kebijakan politik yang rupanya berlanjut terus sampai era pemerintahan Orde Baru.⁹³

Pada masa Orde Baru Soeharto juga memeralat orang-orang keturunan Tionghoa untuk mendukung kekuasaan dan tatanan ekonominya, sebagaimana orang-orang keturunan Tionghoa di zaman kolonial yang dimanfaatkan oleh kolonialis Belanda sebagai kelas perantara. Posisi ekonomi orang-orang keturunan Tionghoa di era Soeharto sangat dominan karena dimanfaatkan untuk membangun melalui jalur pertumbuhan (*developmentalisme*).⁹⁴ Soeharto memberikan kesempatan kepada keturunan Tionghoa untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia untuk memberikan legitimasi kekuasaannya. Dengan begitu ia membuka pintu Indonesia serta menerapkan politik pro-bisnis dan politik asimilasi total sehingga orang-orang keturunan Tionghoa dapat menikmati kebebasan ekonomi dan pembatasan berpolitik.

⁹³*Ibid.*,

⁹⁴Soyomukti, *op. cit.*, hlm. 187.

Memasuki tahun 1986 sampai Agustus 1999 merupakan masa keemasan bisnis etnis Tionghoa di Indonesia. Orang-orang keturunan Tionghoa mengokohkan diri sebagai salah satu pilar penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Para pengusaha Tionghoa bersekutu dengan para pemegang kekuasaan. Mereka mendapat perlakuan istimewa untuk kontrak, izin, dan kredit sebagai imbalan atas bagian keuntungan untuk pejabat yang bersangkutan.⁹⁵ Kedekatan dengan pejabat bahkan sampai ke hal-hal pribadi yang cenderung dihubungkan dengan kolusi, korupsi dan nepotisme juga dilakukan oleh beberapa pengusaha etnis Tionghoa kelas menengah dan atas.⁹⁶ Oleh karena itu berkembangnya ekonomi seperti adanya konglomerat, muncul pada masa Orde Baru.⁹⁷ Nama-nama konglomerat yang menguasai perekonomian Indonesia antara lain Liem Sioe Liong, Eka Tjipta Widjaja, Mochtar Raddy, Suhargo Gondokusumo, dan Projogo Pangestu.⁹⁸

Berkembangnya perusahaan-perusahaan konglomerat etnis Tionghoa di era Soeharto adalah akibat birokrasi patrimonial yang berlaku saat itu. Dalam jenis pemerintahan patrimonial seperti itu, praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) hampir tidak dapat dihindari lagi. Soeharto yang saat itu adalah

⁹⁵Soyomukti, *op. cit.*, hlm. 184-185.

⁹⁶Sejarah Semarang, “Menikmati Eksotika Budaya Tionghoa di Pecinan”, (*online*), (<http://sejarahsemarang.wordpress.com/menikmati-eksotika-budaya-tionghoa-di-pecinan.html>, diunduh pada 8 September 2013).

⁹⁷Wawancara dengan Jongkie Tio pada 17 September 2013.

⁹⁸Bobby Irwansyah, ‘Tingkat Ekonomi dan Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Pemilukada kota Medan’, dalam *Jurnal Politea*, Politea Jurnal Ilmu politik, Vol. 2 No. 2 Juli 2010, hlm 90.

pemegang kekuasaan utama di Indonesia, menjadi patron paling kuat dan memberikan perlindungan kepada pengusaha, bawahan dan orang-orang yang loyal kepadanya. Praktek KKN dalam struktur birokrasi patrimonial tersebut berimplikasi pada pertumbuhan usaha-usaha etnis Tionghoa di Indonesia selama kurun waktu 32 tahun.⁹⁹

Etnis Tionghoa oleh pemerintah Orde Baru seakan-akan didorong untuk hanya berkiprah di sektor swasta, khususnya bidang perdagangan. Akhirnya, mereka mahir berdagang, dominasi mereka di bidang ekonomi semakin hebat dan tak terkejar oleh kelompok pribumi yang baru akan terjun ke bidang yang sama. Hal lain yang mengkhawatirkan adalah munculnya generasi muda etnis Tionghoa (bergerak di bidang ekonomi dan keuangan) yang lebih terampil dan hebat lagi dari orang tua mereka. Hal ini karena politik pemerintah RI sudah terlanjur tidak mendorong mereka ke bidang-bidang di luar dunia usaha.¹⁰⁰

Posisi ekonomi orang Tionghoa di era Orde Baru masi tetap kuat, bahkan dengan perubahan menuju ekonomi yang semakin integral dengan globalisasi dan dinamika kawasan Asia Tenggara, ekonomi Tionghoa di Indonesia semakin menguat. Posisi ekonomi Tionghoa di era Soeharto sangat dominan karena oleh Soeharto dan orang-orang di pusat kekuasaan Tionghoa masih tetap dimanfaatkan untuk membangun melalui jalur pertumbuhan. Motif di balik program pemerintah tersebut adalah untuk mengerahkan potensi ekonomi Tionghoa di Indonesia dan

⁹⁹*Ibid.*,

¹⁰⁰Jahja, dalam Hamzah, editor, *op. cit.*, hlm. 89.

dengan demikian mendorong mereka menarik lebih banyak modal dari negara-negara lain.¹⁰¹

Akan tetapi di balik menguatnya posisi ekonomi orang Tionghoa, ada hal yang kurang menguntungkan bagi orang keturunan Tionghoa apabila ada dari kalangan mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang negatif atau berkaitan dengan tindakan kriminalitas. Salah satu orang Tionghoa yang terlibat kasus kriminalitas adalah Aseng. Aseng adalah seorang Tionghoa yang merupakan bandar perjudian terbesar di Jawa Tengah, khususnya di Semarang.¹⁰² Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh beberapa orang dari kalangan keturunan Tionghoa telah meninggalkan kesan yang memberikan gambaran jelek bagi seluruh kalangan Tionghoa.¹⁰³

Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kawasan Pecinan Semarang sudah memperlihatkan perannya dalam bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan perkembangan kawasan yang sangat cepat, seperti Pecinan Lor tumbuh paling awal sebagai daerah ekonomi yang ramai. Hal ini disebabkan daerah Pecinan Lor merupakan daerah penghubung antara bagian kawasan Pecinan lainnya dengan Pasar Pedamaran dan bagian wilayah kota lainnya.¹⁰⁴ Penyebutan kawasan di

¹⁰¹Soyomukti, *op. cit.*, hlm. 186-187.

¹⁰²JPNN, “Chaerul Rasyid Dikejar soal Kasus Judi”, (*online*), (<http://www.jpnn.com/caherul-rasyid-dikejar-soal-kasus-judi.html>), diunduh pada 20 April 2014).

¹⁰³Husodo, *op. cit.*, hlm. 97.

¹⁰⁴Titiek Suliyati, “Dinamika Kawasan Permukiman Etnis di Semarang” (Laporan Penelitian Pusat Studi Asia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang, tt), hlm. 11.

Pecinan ada beberapa yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Pecinan Lor kemudian namanya lebih dikenal masyarakat sekitarnya sebagai Gang Warung. Hal ini dikarenakan kebiasaan pedagang Tionghoa yang menata barang-barang dagangan di muka rumahnya yang kemudian oleh penduduk setempat disebut warung. Sedangkan Gang Mangkok dinamakan demikian sebab orang Tionghoa yang berada di kawasan tersebut banyak yang berdagang gerabah dan keperluan rumah tangga, antara lain mangkok.

Pengelompokan usaha perdagangan bukan berarti tidak ada jenis usaha yang dilakukan orang Tionghoa. Sepanjang Gang Pinggir merupakan sentra perdagangan emas. Gang Lombok merupakan sentra makanan khas atau makanan tradisional Cina. Gang Pedamaran merupakan sentra perdagangan jamu dan kelontong. Gang Warung merupakan sentra perdagangan kain. Gang Beteng merupakan sentra grosir alat tulis. Gang Baru merupakan sentra perdagangan hasil bumi dan kebutuhan ritus masyarakat Tionghoa. Gang Gambiran, Gang Belakang dan Gang Mangkok merupakan sentra jasa. Gang Tengah merupakan sentra perkantoran dan jasa. Gang Besen merupakan sentra jasa pembuatan pintu dan pagar besi.¹⁰⁵

Membuka usaha atau toko tentu memerlukan modal, namun bukan berarti satu-satunya modal adalah uang. Modal awal membuka toko menurut orang Tionghoa adalah keberanian, yaitu tekad untuk sukses dan tidak putus asa jika gagal; kepercayaan yang selalu dijaga baik terhadap pelanggan maupun pemasok;

¹⁰⁵Titiek Suliyati, *et al.*, "Model Penataan Kawasan Pecinan pada Kota Pantai yang Berbasis Budaya dan Bersinergi dengan Aktivitas Ekonomi Masyarakat" (Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 89-92.

dan relasi/jaringan yang luas. Sistem pembelian konsinyasi dapat diterapkan apabila tidak memiliki banyak modal uang. Sistem pembelian konsinyasi – laku baru bayar ke pemasok – merupakan alternatif yang terbaik. Kekurangan modal juga dapat ditutupi dengan bekerja sama antar teman atau saudara (kongsi).¹⁰⁶ Sedangkan untuk barang dagangan, orang Tionghoa di Pecinan Semarang memperoleh barang dagangan dari pemasok atau *supplier*. Pemasok diwakili oleh salesman yang akan menawarkan barang dagangan. Biasanya barang di drop tetapi pembayarannya menyusul satu bulan berikutnya. Bisa juga menggunakan sistem konsinyasi, yaitu barang baru dibayar apabila terjual.¹⁰⁷

Selain dari salesman, orang-orang keturunan Tionghoa juga mencari barang dagangannya di kota-kota terdekat. Misalnya untuk toko-toko makanan dan toko tekstil, ada juga barang yang didatangkan dari luar kota. Toko yang menjual pernak-pernik Imlek (produk-produk Chinese Art) dan peralatan sembahyang seperti toko Apple Collection, toko Bintang Jaya di Gang Pinggir, toko Guna Agung dan toko Anita di Gang Pinggir, sebagian barang-barangnya didatangkan (diimpor) dari Tiongkok dan sebagian lagi dibuat sendiri.¹⁰⁸ Biasanya barang-barang yang disediakan berdasarkan permintaan masyarakat.

Kampung Pecinan memiliki ciri khas yakni adanya bangunan kelenteng, juga memiliki karakteristik sebagai kawasan hunian dan perdagangan, sebab

¹⁰⁶Istijanto Oei, *Rahasia Sukses Toko Tionghoa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 35, 38.

¹⁰⁷Oei, *op. cit.*, hlm. 93.

¹⁰⁸Wawan Hermawan, “Mengais Untung, Meraup Berkah”, dalam *Suara Merdeka*, Edisi Imlek 2555, Sabtu Pon 17 Januari 2004, hlm. 15.

umumnya rumah-rumah Tionghoa adalah model rumah toko (ruko).¹⁰⁹ Orang-orang keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang umumnya berprofesi sebagai pedagang. Keuletan dan keberhasilan orang-orang Tionghoa sebagai pedagang dan pengusaha terlihat dari banyaknya ruko-ruko (rumah toko) di sepanjang Gang di Pecinan. Ruko yang ada di sepanjang kawasan Pecinan digunakan untuk tempat berdagang atau berjualan sekaligus tempat tinggal warga Tionghoa. Toko-toko milik orang-orang keturunan Tionghoa yang dapat dijumpai di Pecinan antara lain toko perlengkapan sembahyang dan pernak-perniknya, toko tekstil (kain), toko obat-obatan Cina, toko grosir dan lain-lain.¹¹⁰

Perkembangan sistim sosial ekonomi telah membuat sistim ekonomi tradisional di dalam masyarakat Tionghoa tidak dapat menjawab perkembangan ekonomi modern di wilayah perkotaan. Umumnya, orang-orang Tionghoa lebih suka mempekerjakan dirinya sendiri dengan menjalankan toko atau perusahaan kecil keluarganya. Mereka bekerja di dalam gedung sebagai rumah toko.¹¹¹

Ruko terjadi sebagai percampuran arsitektur akibat perdagangan di sepanjang kota-kota pantai antara Cina dan Asia Tenggara oleh orang Barat, orang Tionghoa dan penduduk setempat. Itulah sebabnya ruko terdapat pada hampir semua kota-kota pantai di daerah Cina Selatan sampai Asia Tenggara. Salah satu

¹⁰⁹Yustina Hastrini Nurwanti, 'Dinamika Kewirausahaan Kuliner: Lunkpia Semarang Tahun 1965-2009', dalam *Jurnal Patrawidya* Vol. 12 No. 2 (Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 2011), hlm. 236-238.

¹¹⁰Wawancara dengan Amin Cahyono pada 17 Januari 2014.

¹¹¹Pratiwo, 'Jalan Sebagai Perwujudan Perubahan Kultural Masyarakat Cina di Semarang', dalam *Lembaran Sejarah* Volume 2 No. 1 (Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1999), hlm. 119.

ciri khas daerah Pecinan adalah kepadatannya yang sangat tinggi. Ruko (*shop houses*) merupakan ide pemecahan untuk menanggulangi masalah tersebut. Ruko merupakan perpaduan antara daerah bisnis/tempat usaha di lantai bawah (lantai satu) dan daerah tempat tinggal di lantai atas (lantai dua). Bangunan tersebut membuat suatu kemungkinan kombinasi dari kepadatan yang tinggi dan intensitas dari kegiatan ekonomi di daerah Pecinan. Pertumbuhan Ruko dimulai oleh pedagang Tionghoa yang mempunyai pola hidup sebagai pedagang, dimana mereka beranggapan bahwa pada taraf hidup awal, bidang usahanya dapat diurus oleh satu atau beberapa anggota keluarganya dan untuk mempersingkat waktu, maka bangunan dijadikan sebagai tempat usaha atau kantor, toko, gudang yang sekaligus dipakai untuk rumah tinggal. Sebanyak 60% dari luas lantai diperuntukkan bagi tempat tinggal dan 40% nya dipergunakan untuk bisnis.¹¹² Ruko-ruko tersebut dapat dijumpai di sekitar Gang Warung, Gang Baru, dan Gang Pinggir.

Ilmu ruang Tionghoa yang sering disebut sebagai *Feng Shui*, sering diterapkan pada bangunan ruko pada masa lampau sampai saat ini. Bentuk dasar dari ruko di daerah Pecinan dindingnya terbuat dari bata dan atapnya berbentuk perisai dari genting. Setiap unit dasar mempunyai lebar 3 sampai 6 meter, dan panjangnya kurang lebih 5 sampai 8 kali lebarnya. Pada setiap unit ruko terdapat satu atau dua meter teras sebagai transisi antara bagian ruko dan jalan umum. Bentuk ruko yang sempit dan memanjang tersebut menyulitkan pencahayaan dan

¹¹²Handinoto, 'Perkembangan Arsitektur Tionghoa di Indonesia', dalam Myra Sidharta, *et al.*, *Peranakan Tionghoa Indonesia, Sebuah Perjalanan Budaya* (Jakarta: Intisari Mediatama dan Komunitas-Lintas Budaya, 2009), hlm. 84.

udara bersih yang sehat masuk kebagian tengah dan belakang. Hal itu dipecahkan dengan pembukaan dibagian tengahnya, yang bisa langsung berhubungan dengan langit (berupa *courtyard*/ruang terbuka).¹¹³

Satu deretan ruko bisa terdiri dari belasan unit yang digabung menjadi satu. Orang-orang keturunan Tionghoa yang lebih kaya bisa memiliki lebih dari satu unit dalam deretan ruko tersebut. Pada awal perkembangannya, detail-detail konstruksi dan ragam hiasnya sarat dengan gaya arsitektur Tionghoa. Akan tetapi, setelah akhir abad ke- 19 dan awal abad ke- 20 sudah terjadi percampuran dengan sistim konstruksi (mulai memakai kuda-kuda pada konstruksi atapnya) dan ragam hias campuran dengan arsitektur Eropa. Bahkan pada pertengahan abad ke- 20 sampai akhir abad ke- 20 corak arsitektur Tionghoanya sudah hilang sama sekali.¹¹⁴

Pada akhir abad ke- 20 corak arsitektur ruko sudah berkembang lebih pesat lagi. Bentuk dasar pada satu unit ruko masih belum banyak mengalami perubahan, tetapi tampak luarnya merupakan pencerminan arsitektur pasca modern, tidak ada sedikitpun corak arsitektur Tionghoanya yang tertinggal. Bangunan ruko pada akhir abad ke- 20 ini sudah banyak yang terletak di daerah perdagangan dalam tata ruang kota (keluar dari daerah Pecinan). Fasilitas bangunannya pun sudah di sesuaikan dengan zaman sekarang, seperti adanya parkir mobil, dan fasilitas umum lainnya. Arsitektur ruko yang pada awalnya berkembang di daerah Pecinan

¹¹³*Ibid.*,

¹¹⁴Handinoto, *op. cit.*, dalam Sidharta, *et al.*, hlm. 85.

sekarang berkembang di berbagai kota di Jawa dengan mengikuti perkembangan zaman.¹¹⁵

Dunia perdagangan selalu sarat dengan perubahan dan penyesuaian zaman. Pada wujud fisik bangunan ruko, ada hal-hal yang harus tetap dipertahankan dan ada hal-hal yang berubah. Fungsi dan efisiensi ruko tidak berubah. Hal ini tercermin dengan adanya denah-denah per satu unit ruko, bahkan sekarang lebih di efisienkan dengan menambah tingkat pada satu unit ruko menjadi tiga atau empat lantai. Akan tetapi penampilan ruko selalu di sesuaikan dengan keadaan zaman. Pada zaman kolonial Belanda, banyak sekali unsur-unsur atau elemen arsitektur dari Eropa, seperti kolom-kolom gaya Yunani atau detail-detail jendela serta lainnya coba untuk diterapkan dalam arsitektur ruko. Saat ini gaya-gaya postmodern banyak dipakai untuk penampilan luar ruko, tetapi bentuk dasar denah ruko masih tetap saja dari dulu sampai sekarang.¹¹⁶

Keberadaan suatu pasar juga sangat penting selain pusat perdagangan dan toko-toko bagi perkembangan perekonomian. Oleh karena itu, pasar umumnya terletak di dekat pemukiman. Pasar yang dekat dengan pemukiman orang-orang keturunan Tionghoa adalah Pasar Kranggan dan Pasar Gang Baru. Pasar Kranggan dan Pasar Gang Baru merupakan tempat terjadinya interaksi yang intensif antara orang-orang keturunan Tionghoa dengan penduduk setempat lainnya.¹¹⁷

¹¹⁵*Ibid.*,

¹¹⁶*Ibid.*,

¹¹⁷Nurwanti, *op. cit.*, hlm. 238.